



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BANK INDONESIA (BI)  
**UNIT KERJA** : KPW PROVINSI SUMATERA UTARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RUDY BRANDO HUTABARAT
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 276605

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 18.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/187 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.425.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 960.000.000

1. MOBIL, MERCEDEZ BENZ SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 184.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.499.473.407
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	33.068.473.407
III. HUTANG	Rp.	1.832.350.256
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	31.236.123.151

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.